

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pengangguran merupakan isu utama dan telah menjadi perdebatan dalam setiap penyusunan kebijakan perekonomian. Permasalahan ini tidak hanya sering ditemui di negara-negara sedang berkembang maupun dunia ketiga, akan tetapi juga dapat menjadi permasalahan serius di negara-negara maju (Todaro, 2003). Faktor jumlah penduduk, karakteristik kegiatan perekonomian seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, kondisi perekonomian, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya menjadi topik utama pembahasan kebijakan ekonomi hingga saat ini. Pengangguran sebagai bagian dari persoalan ekonomi memiliki keterkaitan yang cukup luas dengan berbagai aspek sosial dan ekonomi seperti masalah kriminalitas, kesenjangan sosial, ketidakstabilan kondisi perekonomian, kemiskinan, dan dampak buruk lainnya.

Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahun, membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja, dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu pengangguran relatif akan juga bertambah. Kecemasan sebagai bangsa saat ini sebenarnya tidak saja dipicu oleh pengangguran terbuka, tetapi juga pada jumlah penganggur total yang juga semakin membengkak. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 jumlah penganggur

terbuka di Indonesia terus meningkat dari sebesar 9,53 juta jiwa menjadi kurang lebih 10 juta jiwa meskipun pada tahun 2007 angka pengangguran ini mengalami penurunan 5,01 persen (Tabel 1.1). Hal ini dalam jangka panjang akan menjadi benih yang subur terhadap timbulnya berbagai ketidakstabilan sosial dan politik, apabila permasalahannya tidak ditangani secara cepat dan tepat.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Pengangguran Terbuka di Indonesia**

Tahun	Pengangguran Terbuka	
	Jumlah	%
2003	9.531.000	4,37
2004	9.744.000	2,23
2005	10.854.000	11,39
2006	11.104.000	2,3
2007	10.013.000	-5,01

Sumber : Statistik Indonesia, BPS, berbagai edisi

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah membaik pada masa pemulihan ekonomi, tetapi di sisi lain terlihat pula gejala yang kurang mengembirakan. Pemulihan ekonomi tampaknya belum diikuti dengan penciptaan kesempatan kerja yang memadai. Struktur ekspansi perekonomian yang belum diimbangi peningkatan kapasitas produksi secara signifikan mengakibatkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam penciptaan kesempatan kerja menjadi terbatas. Padahal dalam berbagai jejak pendapat terlihat bahwa masyarakat menginginkan agar masalah penciptaan kesempatan kerja dijadikan prioritas untuk segera dipecahkan.

Produk Domestik Bruto/*Gross Domestic Product* merupakan salah satu indikator pendapatan nasional yang menyatakan nilai total output yang dihasilkan dalam suatu negara selama 1 tahun (Samuelson dan Nordhaus, 2002:112).

Kebijakan ekonomi yang berorientasi untuk menekan tingkat pengangguran merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.

Selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 perekonomian Indonesia mengalami proses pemulihan. Laju pertumbuhan ekonomi secara bertahap mengalami peningkatan dari 4,9 persen pada tahun 2003 menjadi 6,3 persen pada tahun pada tahun 2007. Gambaran lebih jelas terlihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Produk Domestik Bruto Riil (Miliar rupiah)</b>	<b>%</b>
2003	1.579.558,9	4,9
2004	1.656.825,7	4,9
2005	1.750.815,2	5,6
2006	1.847.815,2	5,5
2007	1.963.947,3	6,3

Sumber : Statistik Indonesia, BPS, berbagai edisi

Secara teoritis, jika perekonomian mengalami pertumbuhan, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Artinya bahwa bila laju pertumbuhan ekonomi tinggi maka jumlah pengangguran akan menurun. Sebaliknya, bila pertumbuhan ekonomi turun, maka semakin besarlah tingkat pengangguran. Pengangguran berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi berhubungan dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru. Dengan demikian, secara

relatif semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin besarlah harapan untuk tidak menganggur (Samuelson dan Nordhaus, 2002 : 653).

Indikator makro lainnya yang menarik untuk diperhatikan adalah perkembangan laju inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi pembangunan yang penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Dari sudut pandang manapun, inflasi menjadi indikator utama adanya stabilitas moneter. Para konsumen, produsen dan pemerintah pada dasarnya tidak menghendaki tingginya inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi jelas merupakan hal yang sangat merugikan bagi perekonomian negara.

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang tidak bisa diabaikan karena dapat menimbulkan dampak bagi perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat dan menyebabkan terjadinya fluktuasi pada tingkat pengangguran. Para ekonom meyakini bahwa faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi merupakan faktor yang memiliki potensi yang dapat mempengaruhi terjadinya pengangguran (Dornbusch dan Fischer, 2004:487). Kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran akan berdampak mendorong terjadinya inflasi di masa yang akan datang. Mazhab monetaris dan Keynes yang masing-masing dikemukakan oleh Friedman dan Tobin menyatakan bahwa upaya untuk menghentikan inflasi akan menciptakan pengangguran. Berdasarkan pengalaman yang terjadi dalam perekonomian Indonesia selama ini, inflasi selalu dan sepertinya tidak pernah bosan mengikuti seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi nasional.

Inflasi di Indonesia, dalam perkembangannya dari tahun ke tahun terlihat cukup bergejolak. Keadaan ini terutama disebabkan karena kepekaan perekonomian Indonesia terhadap pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selama kurun waktu tahun 1987 sampai dengan 2007, laju inflasi tertinggi terjadi saat krisis ekonomi pada awal tahun 1998 yakni sebesar 77,6 persen. Namun kondisi tersebut mulai mengalami perbaikan pasca krisis ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari penurunan laju inflasi dari 77,6 persen pada tahun 1998 menjadi 2,0 persen pada tahun 1999. Namun demikian, angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 9,4 persen pada tahun 2000. Peningkatan perkembangan laju inflasi pun terus berlanjut. Pada tahun 2001, laju inflasi meningkat menjadi 12,6 persen kemudian secara perlahan menurun menjadi 6,6 persen pada tahun 2007, walaupun melonjak naik hingga 17,11 persen pada tahun 2005 (lihat Tabel 1.3).

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Laju Inflasi di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Inflasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Inflasi</b>
1987	9,1	1998	77,6
1988	8,2	1999	2,0
1989	6,3	2000	9,4
1990	7,9	2001	12,6
1991	9,3	2002	10,0
1992	7,6	2003	5,1
1993	9,6	2004	6,4
1994	8,6	2005	17,1
1995	9,4	2006	6,6
1996	8,0	2007	6,6
1997	11,1		

Sumber: Statistik Indonesia, BPS, berbagai edisi

Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi pun berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat inflasi disebabkan adanya dampak dari peningkatan pendapatan. Selanjutnya, peningkatan pendapatan ini

mendorong terjadinya kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Kemudian kenaikan harga ini direspon oleh sisi penawaran melalui penambahan jumlah output yang dihasilkan. Untuk dapat menambah jumlah output yang dihasilkan, maka dibutuhkan input termasuk salah satunya adalah input tenaga kerja. Dengan demikian, secara relatif semakin tinggi tingkat inflasi maka makin besarlah harapan untuk tidak menganggur.

Isu pengangguran merupakan fenomena yang terjadi di semua wilayah termasuk di Kawasan Barat Indonesia (KBI) maupun di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Perkembangan hasil pembangunan yang telah dicapai Indonesia menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara KTI dan KBI, dalam hal ini KTI masih relatif tertinggal dibandingkan dengan KBI dilihat dari aspek sumber daya manusia.

**Tabel 1.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di KTI**

Provinsi	TPT	
	2006	2007
Nusa Tenggara Barat	8,90	6,48
Nusa Tenggara Timur	3,65	3,72
Sulawesi Utara	14,62	12,35
Sulawesi Tengah	10,31	8,39
Sulawesi Selatan	12,76	11,25
Sulawesi Tenggara	9,67	6,40
Gorontalo	7,62	7,16
Sulawesi Barat	6,45	5,45
Maluku	13,72	12,20
Maluku Utara	6,90	6,05
Papua Barat	10,17	9,46
Papua	5,83	5,01

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS, 2007

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kawasan Timur Indonesia pada umumnya mengalami penurunan. Hanya provinsi Nusa Tenggara Timur yang

mengalami peningkatan tingkat pengangguran yakni dari 3,65 persen pada tahun 2006 menjadi 3,72 persen pada tahun 2007 (Tabel 1.4). Tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2006 dan tahun 2007 terjadi di provinsi Sulawesi Utara yakni sebesar 14,62 persen dan 12,35 persen. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis memilih Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah penelitian.

Struktur ketenagakerjaan tahun 2007 tidak mengalami perubahan dibandingkan keadaan tahun 2006. Penduduk yang termasuk angkatan kerja masih lebih banyak dari bukan angkatan kerja. Demikian juga untuk penduduk yang termasuk angkatan kerja, penduduk yang bekerja masih lebih banyak dari yang menganggur. Sedangkan untuk bukan angkatan kerja, penduduk yang mengurus rumah tangga masih menduduki tempat teratas, kemudian bersekolah dan lainnya (kegiatan selain mengurus rumah tangga maupun bersekolah).

**Tabel 1.5**  
**Penduduk Usia Kerja Provinsi Sulawesi Utara**

Jenis Kegiatan	Tahun	
	2006	2007
Bekerja	828.550	908.503
Pengangguran	105.875	127.996
<i>Angkatan Kerja</i>	<i>970.416</i>	<i>1.036.499</i>
Sekolah	135.456	135.611
Mengurus Rumah Tangga	443.542	398.195
Lainnya	89.868	102.350
<i>Bukan Angkatan kerja</i>	<i>668.866</i>	<i>636.156</i>
<i>Penduduk Usia Kerja</i>	<i>1.639.282</i>	<i>1.672.655</i>

Sumber : Sulawesi Utara Dalam Angka, BPS, 2008

Bila dilihat dari seluruh penduduk usia kerja, persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja sekitar 61,97 persen dan sisanya sebesar 38,03 persen adalah bukan angkatan kerja, seperti terlihat pada Tabel 1.5. Sedangkan dari total angkatan kerja, sekitar 87,65 persen merupakan penduduk bekerja dan

pengangguran sekitar 12,35 persen. Komposisi penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu mengurus rumah tangga 62,59 persen, sekolah 21,32 persen dan lainnya 16,09 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007 sebesar 12,35 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari sekitar 100 orang penduduk yang termasuk kedalam angkatan kerja hanya 12-13 orang yang menganggur selebihnya sudah mempunyai pekerjaan atau bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) provinsi Sulawesi Utara selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 mengalami penurunan, yaitu 14,05 persen (tahun 2005), 14,62 persen (tahun 2006), dan turun menjadi 12,35 persen (tahun 2007). Namun bila dibandingkan dengan TPT nasional (9,11 persen), TPT provinsi Sulawesi Utara tahun 2007 masih termasuk tinggi dan berada di urutan keempat tertinggi di antara TPT provinsi lainnya di Indonesia. Namun hal tersebut sudah lebih baik dari keadaan tahun 2006 yang berada di urutan kedua tertinggi. Melihat hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Utara Periode 1987 – 2007.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada sub bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara periode 1987-2007?



2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara periode 1987-2007?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemudian mengetahui secara empiris:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara periode 1987-2007.
2. Pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara periode 1987-2007.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau kepustakaan mengenai kajian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara. Pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang obyektif dalam memutuskan rancangan kebijaksanaan ekonomi.

### 1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan, maka hipotesis penelitian yang dapat diambil adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara periode 1987-2007.
2. Inflasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara periode 1987-2007.

### 1.6. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Statistik Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta data-data yang diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal yang terpublikasikan. Data yang digunakan adalah data runtut waktu (*time series*) periode 1987-2007.

Penelitian ini akan menggunakan alat analisis model harapan adaptif yaitu model rasionalisasi yang dikemukakan oleh *Nerlove* (Gujarati, 2009:632) yaitu dalam apa yang disebut sebagai model penyesuaian *stock* atau penyesuaian parsial (PAM : atau *Partial Adjustment Model*). Adapun formulasi model tersebut dapat diketengahkan sebagai berikut ini:

$$PT = f(PE, INF)$$

Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$PT = a_0 + a_1PE + a_2INF + a_3PT_{t-1} + U_t$$

dimana:

PT = Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Utara (persen)

PE = Pertumbuhan Ekonomi (persen)

INF = Tingkat Inflasi (persen)

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian statistik. Pengujian asumsi klasik meliputi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas, sedangkan pengujian statistik terdiri dari Uji-F, Uji-t, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### 1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam ini dibagi menjadi lima bagian dengan urutan penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan penelitian, studi terkait, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Pembahasan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, yaitu teori tentang pengangguran dan makroekonomi.

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang jenis dan sumber data, ~~definisi operasional, model penelitian beserta uji-uji yang akan~~ digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

Bab ini berisi uraian tentang pembahasan hasil analisis, pengolahan data serta pengujian statistik.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, akan disampaikan kesimpulan dari data yang dianalisis dan saran-saran untuk masa yang akan datang.